

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (<i>COVER</i>)	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS	iv
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN TESIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	16
1.3. Tujuan Penelitian	17
1.4. Manfaat Penelitian	17
1.5. Kerangka Teori	18
1.5.1. Teori Hierarki Peraturan Perundang- Undangan	18
1.5.2. Teori Hukum Ekonomi	23
1.5.3. Teori Tanggung jawab Hukum	27
1.6. Definisi Konsep	30
1.7. Metode Penelitian	33
1.7.1. Tipe Penelitian	33
1.7.2. Pendekatan Masalah	33
1.7.3. Sumber Bahan	34
1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan	36
1.7.5. Analisis Bahan	36
1.8. Sistematika Penulisan	37

BAB II	TINJAUAN KEPUSTAKAAN	39
	2.1. Perkembangan Teknologi Telekomunikasi	
	Seluler	39
	2.2. Rekomendasi Kebijakan dan pengaturan	
	Penetrasi Infrastruktur dan layanan telekomunikasi	
	Berbasis <i>mobile broadband</i> global	46
	2.2.1. Rekomendasi Kebijakan dan Peraturan	
	Untuk telekomunikasi di daerah pedesaan	
	Dan terpencil dari ITU (<i>International Telecommunication Union</i>)	46
	2.2.2. Rekomendasi Kebijakan Penetrasi broadband	
	Di wilayah pedesaan dari <i>Alliance for Affordable Internet</i>	49
	2.2.3. Rekomendasi peraturan dan kebijakan untuk	
	Mendorong cakupan broadband seluler di negara	
	Berkembang dari GSMA (<i>Global System for Mobile Communication Assiciation</i>)	57
	2.2.4. Rekomendasi Kebijakan tentang pencapaian	
	Layanan telekomunikasi untuk semua penduduk	
	Demi mendukung tujuan transpormasi digital dari	
	Komisi Broadband ITU/UNESCO	64
	2.2.5. Kebijakan dan Pengaturan tentang penyediaan	
	Infrastruktur dan/atau layanan telekomunikasi	
	di daerah pedesaan di beragai negara	77
	2..3. Evolusi peraturan Telekmunikasi di Indonesia	86
BAB III	KEBIJAKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA	94
	3.1. Kebijakan Penyediaan Infrastruktur dan layanan	
	Telekomunikasi daerah pedesaan melalui <i>Universal Service Obligation</i> (USO) di Indonesia.....	94

3.1.1. Tinjauan hukum Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi daerah pedesaan melalui <i>Universal Service Obligation (USO)</i> ...	94
3.1.2. Pendanaan Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi daerah pedesaan melalui <i>Universal Service Obligation (USO)</i> ...	97
3.2. Kebijakan Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi yang menjadi kewajiban penyelenggara Telekomunikasi di Indonesia	99
3.3. Pengaturan Penyediaan Infrastruktur di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal)	101
3.4. Tinjauan hukum aspek Hierarki Paraturan Perundang-Undangan terkait dengan kebijakan Pemerintah dalam penyediaan Infrastruktur dan Layanan telekomunikasi seluler Teknologi 4G di daerah pedesaan	103
3.5. Penerapan Kebijakan penyediaan infrastruktur dan layanan Telekomunikasi seluler teknologi 4G wilayah pedesaan Di Indonesia	107
BAB IV DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI SELULER TEKNOLOGI 4G DI PEDESAAN	119
4.1. Peran infrastruktur TIK dalam mendukung transormasi Digital di Indonesia	119
4.2. Perkembangan Infrastruktur TIK di Indonesia	126
4.3. Tinjauan hukum aspek hukum ekonomi terkait dengan Kebijakan penyediaan infrastruktur dan layanan Telekomunikasi seluler teknologi 4G di Pedesaan	132
4.4. Bentuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia	136

4.5. Dampak kebijakan penyediaan infrastruktur dan layanan Telekomunikasi di wilayah pedesaan bagi masyarakat	139
4.5.1. Kewajiban penyelenggara telekomunikasi yang Tertuang dalam <i>modern licensing</i> (Izin Penyelenggaraan)	139
4.5.2. Sanksi penyelenggaraan telekomunikasi	145
4.5.3. Dampak Ekonomi	147
4.5.4. Dampak Sosial	155
 BAB V PENUTUP	161
5.1. Kesimpulan	161
5.2. Saran	162
 DAFTAR PUSTAKA	xv
BIODATA PENULIS	xxv